

REALITAS MASYARAKAT PAPUA DALAM DISTORSI REPRESENTASI MEDIA: ANALISIS MEDIA BARU

(Papuan Social Reality Through Distorted Media Representation: A New Media Analysis)

Logan Gunadi Wirawan; Muhamad Fauzan Farendra; Yoas Lintang

Departemen Kriminologi Universitas Indonesia

logan.gunadi@ui.ac.id

ABSTRACT

Media portrayals towards minorities result in implications towards how society as a whole comprehends them. This paper questions how the media representation of Papua reflects the reality of socio-political situation of Papuan people and what the implications of said representations are. Based on secondary data analysis towards Indonesian media's portrayals of Papua, including but not limited to its' constituents and environment, this paper seeks to understand based on new media theories of social reality how the media portrayals of Papua have impacts towards the socio-political experience of Papuans in Indonesians, and Indonesians towards Papuans. The results obtained by the analysis indicate that media employs stereotypical and surface level portrayals of Papua in a way that dismisses the structural issues Papuans are facing. The conclusion of the analysis of this article indicates that the media representation about the experience of the Papuan people hides and ignores the structural problems experienced by the Papuan people by the treatment of the state. This finding shows that media reflection plays a very important role in generating discrimination towards Papuans, leading towards this paper's recommendations that encourage the state to take responsibility for controlling the representation of the Papuan people.

Keywords: *new media social reality; media distortion; Papuan conflict.*

ABSTRAK

Pemberitaan kelompok minoritas dalam media menghasilkan implikasi terhadap bagaimana suatu masyarakat memahami kelompok tersebut. Paper ini mempertanyakan bagaimana representasi media terhadap Papua merefleksikan kenyataan kondisi sosio-politik dari masyarakat Papua dan implikasi dari pemberitaan tersebut. Menggunakan teori media baru, paper ini melakukan analisis berbasis data sekunder terhadap pemberitaan masyarakat dan lingkungan Papua. Hasil yang diperoleh dari analisa ini adalah media menggunakan penggambaran Papua secara stereotipikal dengan cara mengabaikan masalah struktural yang dihadapi orang Papua. Kesimpulan analisis artikel ini mengindikasikan bahwa pemberitaan pengalaman masyarakat Papua menyembunyikan dan mengabaikan permasalahan struktural yang dialami masyarakat Papua oleh perlakuan negara. Penemuan ini menunjukkan bahwa refleksi media sangat berperan dalam menghasilkan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa media merefleksikan peran penting dalam membangun diskriminasi terhadap Masyarakat Papua, berdasarkan penemuan tersebut, rekomendasi dari paper ini mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam mengendalikan representasi masyarakat Papua.

Kata Kunci: *realita sosial media baru; distorsi media; konflik Papua.*

PENDAHULUAN

Perkembangan media baru mengarah pada fakta bahwa informasi yang terkandung di media dengan sangat cepat menjadi bagian dari apa yang diterima oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, representasi dari permasalahan kelompok minoritas, atau sebaliknya pengabaian dari representasi media terhadap permasalahan yang dapat dihadapi sebuah kelompok yang tidak ter-representasikan dalam masyarakat dapat mengakibatkan diskriminasi yang tidak adil terhadap kelompok tersebut.

Masyarakat yang beragam di Indonesia dapat dipandang sebagai keanekaragaman tersendiri yang unik. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki mengakibatkan pandangan yang berbeda antara masyarakat daerah tertentu, bahkan dengan masifnya suku dan budaya yang ada di Indonesia. Dari hal tersebut dapat diamati bahwa menyatukan masyarakat merupakan tantangan yang sulit.

Dengan keberagaman dan masifnya masyarakat, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri harus mengusahakan ketertiban dan juga kelancaran informasi yang sebenar-benarnya. Namun sering kali pemerintah atas nama ketertiban berusaha menyatukan masyarakat tidak sebagai masyarakat yang tahu kebenaran, namun hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya saja.

Idealnya hak dan kebebasan akan kebenaran menjadi hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap masyarakat. Namun pada akhirnya selama pihak mayoritas terpuaskan,¹ maka disitulah target sudah dinyatakan terpenuhi. Ketidakpuasan masyarakat yang minor pada akhirnya tertutup oleh dominasi masyarakat yang lebih mayoritas.² Masyarakat mayoritas disuguhkan oleh wacana positif baik dari pemerintah maupun swasta untuk memberikan kenyamanan. Banyak dari anggota masyarakat yang lebih memikirkan kehidupan

masa depan mereka pribadi³ yang pada akhirnya wacana pemberitaan yang diberikan masyarakat diusahakan membangun ke arah hal positif. Wacana positif yang biasa disiarkan di berita baik di media massa maupun media internet, di mana dapat ditemukan kejanggalan karena merupakan kenyataan semu dapat kita temukan pada wacana wilayah dan masyarakat Papua.

Jika dicari di internet atau media lain kita sering menemukan hal-hal positif seperti kekayaan alam, dan perusahaan Freeport yang sudah diambil alih pemerintah. Kita jarang sekali menemukan wacana realitas sosial masyarakat Papua diangkat ke publik, seperti adanya penambangan emas ilegal di daerah tersebut di mana polisi tidak terlalu mempedulikan dan hanya fokus pada keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta adanya kepentingan politik dan ekonomi di balik itu semua karena pembiayaan hidup terutama bagian keamanan tidaklah murah sehingga dimanfaatkan oleh sponsor untuk memanfaatkan polisi di daerah tersebut.⁴ Pemerintah juga secara terbuka melegalkan tindakan eksploitasi lingkungan tidak hanya sumber daya masyarakat Papua, namun tempat tinggal, hutan, dan tambang emas diambil semua oleh pemerintah demi kepentingan korporat dan transmigran yang bekerja di sana.⁵ Terdapat kesenjangan dalam bagaimana hukum tersebut hanya menghasilkan perubahan praktis bagi kepentingan penguasa dan koleganya saja, di mana masyarakat sering terabaikan. Contoh dari kesenjangan tersebut dapat ditemukan dalam bagaimana masyarakat Papua mengalami kesulitan menjalani kehidupan sosial baik di tanah mereka sendiri atau sebagai masyarakat Indonesia di provinsi lain.

1 Pengaruh suara masyarakat sangat penting sehingga pemenuhan hak sosial, politik atau ekonomi terhadap mereka menjadi poin penting kesejahteraan.

2 Emily Gasser, "The Right to Say Yes: Language Documentation in West Papua," *Australian Journal of Linguistics* 37, no. 4 (October 2, 2017): 502–526.

3 Jennifer Dineen, Mark D. Robbins, and Bill Simonsen, "Social Class: Perception and Reality," *International Journal of Public Administration* 42, no. 1 (January 2, 2019): 55–65.

4 Hipolitus Ringgi Wangge and Stephanie Lawson, "The West Papua Issue in Pacific Regional Politics: Explaining Indonesia's Foreign Policy Failure," *Pacific Review* 0, no. 0 (2021): 1–29, <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1931417>.

5 Ibid.

Sesuai dengan wacana yang telah diberikan, kebanyakan masyarakat tidak peduli terhadap urgensi dari berita yang tersebar. Masyarakat tidak mengkritisi atau berusaha memahami lebih dalam perihal berita yang beredar.⁶ Dalam era serba internet, pengguna internet cenderung menganggap media sebagai lingkungan yang komunikatif⁷, sebagai hiburan semata dan mengabaikan adanya kepentingan-kepentingan di dalamnya. Suatu kebenaran yang diciptakan pada akhirnya menjadi sebuah senjata politik yang kebenaran empirisnya tidak diketahui,⁸ hal tersebut terjadi pada masyarakat Papua.

Terhadap masyarakat Papua banyak dari masyarakat Indonesia yang sering memberi mereka stigma negatif. Marginalisasi terjadi kepada masyarakat Papua dari segala perspektif terutama berkaitan dengan etnis.⁹ Dengan ciri khas mereka baik dari warna dan bentuk tubuh, suara, bahkan logat mereka yang khas sering kali dicap sebagai “entitas” yang berbeda, terutama bagi mereka yang singgah ke pulau lain sering kali mendapat penolakan dari masyarakatnya. Istilah “makar, tidak berpendidikan” sering kali rekat dengan orang Papua, atau yang terburuk, sering kali penghinaan diungkapkan kepada mereka dengan penyebutan “monyet”.¹⁰ Anggapan seperti ini sering muncul menimbang banyak pemberitaan dan wacana tentang Papua

yang masih belum secara menyeluruh menyentuh keadaan demografis sosial mereka dan cenderung terhadap geografisnya saja.

Internet dan akses terbuka ke seluruh tempat merupakan hal yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sering mendorong wacana pembangunan infrastruktur di tanah Papua, pembangunan jalan dan gedung-gedung. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di tahun 2018 mereka sudah membangun sembilan stasiun penguat sinyal, juga akses internet di wilayah pelosok telah digapai untuk memaksimalkan koneksi internet.¹¹ Namun, berdasarkan data dari APJII¹² bahwa selama tahun 2019 sampai 2020 daerah Papua dan Papua Barat terdapat hampir 3 juta pengguna internet di Papua (80-87% penetrasi) dan sekitar 700 ribuan pengguna di Papua Barat (60-75% penetrasi), dari total pengguna internet di Indonesia mencapai 196,71 juta jiwa. Di tahun 2022, data APJII¹³ menunjukkan bahwa tingkat penetrasi daerah Papua sebesar 68,9% dan Papua Barat sebesar 64,8%. Penurunan tersebut terjadi karena potensi pertumbuhan penduduk. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua masih sangat sedikit mendapatkan akses terhadap dunia luar; mereka tidak dapat mengakses media yang menggambarkan masyarakat mereka sendiri dan maka tidak dapat mengetahui ataupun menanggapi representasi media yang dilakukan terhadap mereka.

Gambaran bahwa masyarakat Papua masih digambarkan sebagai bagaimana orang melihat penduduk pedalaman, kurang mengenal

6 Berita yang ada bisa dari berbagai sumber dari majalah, koran, bahkan media elektronik dan internet yang tersebar.

7 Joëlle Swart, Chris Peters, and Marcel Broersma, “Navigating Cross-Media News Use: Media Repertoires and the Value of News in Everyday Life,” *Journalism Studies* 18, no. 11 (2017): 1343–1362.

8 Rick Anderson, “Fake News and Alternative Facts: Five Challenges for Academic Libraries,” *Insights: the UKSG Journal* 30, no. 2 (2017): 4–9.

9 Paul Carson Gilbert, “NGOs and Human Rights Promotion: Socialisation, Framing, and the Case of West Papua” (University of Canterbury, 2008).

10 Dapat diketahui istilah makar mulai muncul terutama terhadap orang Papua karena eksistensi OPM yang menginginkan kemerdekaan Papua. Istilah pendidikan ada karena sejak kemerdekaan Indonesia wilayah Papua menjadi salah satu yang perkembangannya masih sedikit. Istilah monyet yang diberikan banyak muncul karena perbedaan rasial, budaya, dan logat masyarakat Papua dengan masyarakat di daerah mayoritas

11 “Akses Internet Jangkau Pelosok Papua,” *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, accessed September 21, 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/13517/akses-internet-jangkau-pelosokpapua/0/sorotan_media. Terkait eksistensi jaringan akses internet, di daerah pelosok keberadaannya sangatlah minim karena kurangnya penguat sinyal. Stasiun penguat sinyal berbentuk menara sering ditemukan di perkotaan, tapi jarang di daerah terpencil.

12 APJII, *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020* (Jakarta, 2020), accessed June 21, 2022, <https://apjii.or.id/survei>.

13 APJII, *Profil Internet Indonesia 2022* (Jakarta, 2022), accessed June 21, 2022, apjii.or.id.

pendidikan formal dan merupakan minoritas dengan budaya yang asing.¹⁴ Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penciptaan wacana secara khusus akhirnya menjadi hal negatif, pengekspresian terhadap masyarakat Papua cenderung ke arah pembencian.¹⁵ Pemerintah menciptakan sebuah wacana perihal Papua dan pada akhirnya persepsi yang timbul dari wacana tersebut memberikan gambaran negatif.

Eksistensi dari internet dan penyebaran wacana tersebut di internet menciptakan sebuah pro dan kontra yang dengan cepat menyebar luas. Internet merupakan tempat di mana semua orang dapat mendapatkan informasi dan terus menerus mereproduksi informasi tersebut sesuai dengan pemahaman pribadi mereka sehingga wacana tersebut mereproduksi dengan sendirinya. Internet merupakan pikiran publik¹⁶ dan menjadi pusat aktivitas,¹⁷ akibat dari persebaran wacana oleh pemerintah, pikiran masyarakat terpengaruh dan menciptakan realita mereka sendiri terkait masyarakat Papua.

Dari hal ini, maka ada beberapa hal yang bisa diperdalam dan digali secara lebih lanjut seperti: representasi masyarakat Papua dalam pemberitaan media sejajar dengan kenyataan situasi masyarakat Papua; perwujudan pengaplikasian media baru dalam menciptakan sebuah wacana; dan dampak wacana yang dihasilkan pemberitaan masyarakat Papua terhadap kehidupan kemasyarakatan Indonesia.

Masyarakat Papua memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sebagai anggota

dari negara mereka, dan pengabaian dan distorsi representasi yang dilakukan media terhadap masyarakat Papua secara langsung melanggar asas keadilan terhadap perlakuan masyarakat Papua. Representasi yang salah terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua dapat menghasilkan kesulitan dalam mereka untuk mendapatkan bantuan dan peningkatan kemungkinan untuk mendapatkan diskriminasi sebagai hasil dari kesalahpahaman antara kondisi realitas lingkungan sosiopolitik Papua dengan kondisi yang ditampilkan dalam berita.

Paper ini menggunakan analisis data sekunder untuk memperdalam dan menggali secara lebih lanjut permasalahan khusus yaitu media baru dan pengaruhnya terhadap kelompok minoritas, antara lain: representasi masyarakat Papua dalam pemberitaan media sejajar dengan kenyataan situasi masyarakat Papua; perwujudan pengaplikasian media baru dalam menciptakan sebuah wacana; dan dampak wacana yang dihasilkan pemberitaan masyarakat Papua terhadap kehidupan kemasyarakatan Indonesia.

Beberapa artikel sebelumnya melihat berbagai aspek terkait eksistensi Papua disertai dengan berbagai represi dan betapa kuatnya pengaruh penguasa dalam menciptakan realita bagi masyarakat. Keberadaan kuasa mayoritas dapat menjadi pengaruh interaksi budaya sehingga apa yang dianggap normal ditunjukkan oleh budaya mayoritas.¹⁸ Pengaruh yang berkuasa menjadi sangat kuat dalam menciptakan realita bagi masyarakat. Dari literatur tersebut telah terindikasikan beberapa bentuk pengaruh media; sebagai bentuk kesenjangan sosial hingga indikasi terhadap represi. Tindakan-tindakan yang diberikan dari saat Papua ditangan Belanda sampai sudah kembali ke Indonesia masih berpusat pada pengendalian pihak penguasa terhadap masyarakat Papua.¹⁹ Tambahan dari artikel ini adalah

14 Nino Viartasiwi, "The Politics of History in West Papua - Indonesia Conflict," *Asian Journal of Political Science* 26, no. 1 (2018): 141–159, <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535>.

15 Merlyna Lim, "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia," *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (2017): 411–427, <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>.

16 James Lull, "Living with Television and the Internet," *New Media and Society* 23, no. 7 (2021): 1850–1862.

17 Marina Dekavalla, "Understanding Online Safety Through Metaphors: UK Policymakers and Industry Discourses About the Internet," *Television and New Media* (2021): 1–19.

18 Phyllis Sakinofsky et al., "Power Imbalance in Media Representation: An Aboriginal Australian Public Relations Experience," *PRism* 15, no. 1 (2019): 18–33.

19 Nino Viartasiwi, "The Politics of History in West Papua - Indonesia Conflict," *Asian Journal of Political Science* 26, no. 1 (2018): 141–159, <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535>.

penemuan dari bagaimana hal tersebut dilakukan secara sosial dalam bentuk represi melalui distorsi representasi kenyataan sosial masyarakat Papua. Hal-hal tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah bentuk penciptaan citra masyarakat pada akhirnya masih dikendalikan oleh penguasa yang sekarang ini dapat dikatakan sebagai pemerintah.

Permasalahan yang dikaji artikel ini ditemukan dalam bagaimana media menjadi metode yang efektif dalam menciptakan konstruksi masyarakat umum terhadap suatu budaya dan eksistensi kelompok masyarakat tertentu; terutama minoritas.²⁰ Dengan hipotesa tersebut, maka komponen penguasa, media, dan kelompok masyarakat minoritas yang dikendalikan dapat merefleksikan eksistensi sebuah wujud kejahatan negara dan pengabaikan hak-hak warga subjek pengendalian.

METODE PENELITIAN

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah suatu proses upaya untuk memahami permasalahan individu atau sosial dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks, di mana penulis juga akan menginterpretasikan data yang diperoleh.²¹ Terlebih lagi alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena sifat dari kualitatif yang deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam, dapat membuat peneliti lebih berhati-hati dalam memaknai data yang didapatkan agar tidak menghasilkan data yang terlalu subjektif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan bahwa penelitian ini mampu untuk memberikan pemahaman secara lebih rinci,

menyeluruh, dan mendalam tentang bagaimana pengaplikasian media baru diwujudkan dalam menciptakan sebuah wacana dalam menutupi sebuah kejahatan.

Terkait dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur sebagai data sekunder. Studi literatur merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui kajian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian dan dibutuhkan dalam proses penulisan makalah, yang didapatkan melalui artikel pada jurnal, buku, makalah konferensi, dokumen pemerintah, dan sumber lain yang dianggap relevan²². Dalam penulisan ini, studi literatur didapatkan melalui jurnal yang membahas mengenai fenomena pengaplikasian media baru dan berita terkait dengan representasi masyarakat Papua. Selain studi literatur, data sekunder juga diperoleh peneliti melalui data statistik yang berupa laporan persentase secara deskriptif yang berkaitan dengan penulisan makalah ini.

Pada paparan kasus akan menyajikan tiga kata kunci yang berbeda yang digunakan dalam pencarian di internet terkait Papua, kata kunci tersebut adalah 'papua', 'tanah papua', dan 'realita masyarakat papua'. Dari tiga kata kunci tersebut, hanya kata kunci 'realita masyarakat papua' yang menyajikan beberapa pemberitaan terkait keterlibatan negara atau aspek pemerintahan secara negatif dengan daerah dan masyarakat Papua. Kumpulan berita yang ditunjukkan oleh Tabel 1 merupakan berita antara tahun 2021-2022 dengan mengambil beberapa situs berita yang terpercaya. Pencarian berita yang dilakukan menggunakan 4 kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Wincup:²³ *authenticity* yang mempertimbangkan penerbit, *credibility* mempertimbangkan pertanggungjawaban dengan bentuk penyertaan penulis, *representativeness* mempertimbangkan isi dokumen dengan pertimbangan sumber portal

080/02185377.2018.1445535.

20 Liz Jackson and Yulia Nesterova, "Multicultural Hong Kong: Alternative New Media Representations of Ethnic Minorities," *Multicultural Education Review* 9, no. 2 (2017): 93–104, <http://dx.doi.org/10.1080/2005615X.2017.1313021>.

21 W John Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (SAGE Publications Inc., 2018).

22 Ibid.

23 Emma Wincup, *Criminological Research: Understanding Qualitative Methods* (London: SAGE Publications, Limited, 2017).

lain, dan *meaning* untuk melihat kejelasan isi dari berita.

Dengan kata kunci dan kriteria yang dijelaskan, penggunaan Browser yang dipilih adalah Mozilla Firefox dengan fokus portal berita berdasarkan dua pembagian yaitu berita yang terbit dari daerah Papua (Jubi.co.id dan suarapapua.com) dan berita yang sudah mencakup nasional (detik.com, suara.com, idntimes.com, dan lainnya). Pemilihan berita yang mencakup nasional cenderung acak karena dalam portal berita lainnya juga terdapat konten dan isi berita yang sama persis sehingga pemilihan berdasarkan pemenuhan kriteria cenderung lebih mudah karena kriteria *representativeness* dan *meaning* yang dengan mudah diidentifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) karena data yang digunakan dalam penulisan memerlukan penjelasan lebih lanjut secara deskriptif. Teknik analisis konten dalam hal ini merupakan sebuah teknik analisis data yang bersifat sistematis untuk menganalisis makna pesan serta cara menginterpretasikan pesan.²⁴ Penggunaan teknik analisis ini mempermudah penulis dalam menganalisis data yang didapatkan dari berbagai data sekunder yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. Berita Media dan Peredaran Wacana

Artikel ini memperhatikan dua poin analisis utama, yaitu terkait dengan bagaimana media melakukan pemberitaan terhadap masyarakat Papua sebagai produsen yang memengaruhi kehidupan kemasyarakatan di Indonesia dan realitas dari warga sebagai audiens yang memiliki peran sebagai pihak konsumen dari media itu sendiri. Menggunakan kerangka pemikiran teori *social construction*, harus diperhatikan bahwa

media memiliki signifikansi yang sangat besar terhadap kehidupan kemasyarakatan. Konten yang terdapat dalam media sangat mempengaruhi bagaimana konsumen dari media tersebut membangun realitas dari bagaimana mereka mempersepsikan hal-hal yang berkaitan dengan konten media tersebut sebagai nyata.²⁵ Oleh karena itu, mengetahui bagaimana media meliput dan mengkonstruksi realitas sebuah kelompok dapat dilihat sebagai bentuk keikutsertaan media dalam memperkeruh konflik yang ada dalam kelompok tersebut tersebut. Terlebih lagi hal tersebut juga akan berdampak dengan munculnya diskriminasi serta prasangka buruk yang terjadi di masyarakat luar yang tidak sesuai dengan realitas yang ada.²⁶

Prasyarat dari penjelasan mengenai dampak pemberitaan media baru terhadap masyarakat Papua adalah analisis terhadap konten media sebagai titik acuan penelitian dalam makalah ini. Himpunan data mengenai pemberitaan masyarakat Papua berdasarkan kata kunci yang berbeda menghasilkan beberapa penemuan yang relevan untuk dibahas. Berita yang diperoleh melalui kata kunci 'Papua' mengandung konten dengan isi yang serupa dan sejenis, yaitu berita yang menyoroti aspek pembangunan dan kesejahteraan dari situasi lingkungan Papua. Kedua aspek indikator tersebut ter-representasi secara infrastruktur hingga sosiopolitik, dengan pemberitaan yang menyoroti banyak bentuk dari proyek, kemajuan, hingga keunggulan yang dapat ditemukan di Papua. Berita yang diperoleh melalui kata kunci yang lebih rinci, yaitu 'Tanah Papua', menghasilkan penemuan berita yang masih menganut aspek

24 Margrit Schreier et al., "Qualitative Content Analysis: Conceptualizations and Challenges in Research Practice-Introduction to the FQS Special Issue 'Qualitative Content Analysis I,'" *Forum Qualitative Sozialforschung* 20, no. 3 (2019): 1–27.

25 Persepsi tersebut bisa muncul karena paparan terus-menerus dengan wacana berita tersebut sehingga menjadi percaya dengan konten tersebut. Lengkapnya dapat dibaca di Olivier Le Deuff and Arthur Perret, "Hyperdocumentation: Origin and Evolution of a Concept," *Journal of Documentation* 75, no. 6 (2019): 1463–1474.

26 Dapat diketahui bahwa media masih merupakan industri berbasis keuntungan sehingga tetap butuh masyarakat masif sebagai pelanggannya. Pemerintah yang menyediakan wacana disertai media yang melebihi-lebihkan menjadi dua elemen besar mengapa masyarakat memiliki perspektif buruk pada kelompok minoritas.

indikator yang sama dengan pencarian pertama, yaitu pembangunan dan kesejahteraan dalam pemberitaan mengenai kondisi modernisasi penanaman hingga perkembangan dari sumber daya yang diberikan ataupun dikembangkan dalam lingkungan agrikultur Papua.

Berita dengan indikator aspek realita sosial yang berbeda baru ditemukan dalam perincian kata kunci terakhir, yaitu 'Realita Masyarakat Papua', yang secara mayoritas menampilkan pemberitaan terhadap banyaknya konflik dan permasalahan dalam lingkungan masyarakat Papua. Permasalahan yang ditemukan dalam pemberitaan realita masyarakat Papua tidak mengabaikan sektor-sektor yang sudah disoroti oleh pemberitaan dalam penemuan sebelumnya, contoh langsungnya seperti bagaimana pemberitaan terhadap kemajuan pembahasan RUU Tiga Provinsi oleh DPR berada dalam satu lingkungan media dengan pemberitaan terhadap bagaimana hukum dan HAM dalam persidangan Papua tidak pernah diselesaikan. Banyak sekali juga pemberitaan yang mencakup permasalahan berbasis pembangunan pesat yang terjadi di lingkungan masyarakat Papua sebagai konsekuensi dari perkembangan infrastruktur negara.

Analisis terhadap kesenjangan antara aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam pemberitaan berita komersial atau *mainstream* mengenai masyarakat Papua dengan kenyataan situasi

yang dialami masyarakat Papua secara konklusif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Papua yang digambarkan oleh media dengan kenyataan pengalaman masyarakat Papua. Pada tingkatan yang paling mendasar, indikator aspek kemasyarakatan antara berita yang paling mudah ditemukan mengenai Papua dengan berita mengenai situasi kenyataan di Papua sudah menunjukkan perbedaan yang drastis.

Pemberitaan media komersial yang merupakan mayoritas dari media yang akan ditemukan oleh warganegara pada rata-ratanya hanya mengikuti kerangka pemberitaan yang stereotipikal, merepresentasikan Papua sebagai daerah yang belum berkembang dan maka melalui pembangunan dan dukungan negara sedang dalam proses menuju modernisasi yang menghilangkan segala permasalahan yang terdapat dalam situasinya sekarang. Hal ini kontras dengan indikator aspek kemasyarakatan yang ditemukan dalam pemberitaan mendalam mengenai realita kenyataan masyarakat Papua, di mana banyak sekali akar struktural permasalahan yang menghasilkan konflik dan permasalahan seperti kemiskinan, ketidakadilan struktur hukum, hingga pengambilan alih dari negara dalam pengarahannya pembangunan yang mengakibatkan permasalahan dan konflik yang dialami masyarakat Papua untuk tidak dapat mencapai penyelesaian.

Tabel 1 Kumpulan Berita

No.	Kata Kunci	Judul Berita	Isi Konten
1	papua	Megawati Bicara Keragaman RI Hingga soal Papua: Saya Tahu Ilmu Genetika	Keberagaman suku dan ras
		Dorong Elektrifikasi, PLN Bangun 11 Proyek Listrik di Papua dan Maluku	Pembangunan infrastruktur
		DPR Akan Bahas RUU Tiga Provinsi Baru di Papua	Pemekaran provinsi baru
2	tanah papua	Jokowi: Tanah Papua Cocok untuk Sagu, Jangan Dipaksa Tanam Padi	Potensi produk pangan
		5 Pesona Tanah Papua, Mutiara di Ujung Timur Indonesia	Keindahan alam Papua
		Dorong Harga Bapok di Pedalaman Murah, Mensos Berikan 2 Unit Truk untuk GKI Tanah Papua	Bantuan dan dukungan pemerintah terhadap masyarakat
3	realita masyarakat papua	Cerita Orang Papua: Dipaksa Teriak Merdeka Tanpa Diberi Hak Kemerdekaan	Represi aparat ke masyarakat Papua
		Realitas pembangunan di Papua tak sebagus perencanaan Pemprov Papua	Buruknya pelayanan dan pendidikan
		Gobay: Papua Gudang Masalah Hukum dan HAM yang Tidak Pernah Selesai	Permasalahan HAM dan politik yang masif

Sumber: Berita online tahun 2021-2022. Diolah kembali.

Kesimpulan dari pemberitaan media terhadap Papua maka adalah bahwa terdapat kesenjangan antara gambaran yang ingin disoroti mengenai realita masyarakat dan lingkungan Papua dengan kenyataan yang dihadapi dan dialami oleh masyarakat Papua itu sendiri. Analisis selanjutnya maka akan mencakup analisa dampak dari kesenjangan tersebut terhadap kehidupan kewarganegaraan dan bagaimana kesenjangan pemberitaan media berpotensi untuk memfasilitasi atau mempengaruhi permasalahan yang sudah dialami masyarakat Papua.

Media melakukan glorifikasi terhadap suatu wacana sehingga banyak respon berlebihan dari masyarakat.²⁷ Hal tersebut menghasilkan realita sosial melalui mempengaruhi konstruksi dari kenyataan bagi konsumen dari media tersebut.²⁸ Dalam kasus ini, warganegara dalam

mengonsumsi media membangun realita mengenai masyarakat Papua sesuai dengan sorotan dan gambaran yang dikonstruksi oleh media yang dihasilkan melalui bagaimana Papua diberitakan. Kesenjangan yang terdapat dalam pemberitaan media terhadap kenyataan pengalaman masyarakat Papua menghasilkan realita sosial yang tidak representatif dari kenyataan yang dialami masyarakat Papua. Pemberitaan yang menyoroti pembangunan yang ditemukan untuk menempati mayoritas pemberitaan Papua secara langsung mengabaikan kenyataan dari permasalahan dan konflik yang dialami masyarakat Papua. Pengabaian ini melalui keterkaitan media baru dengan kehidupan kemasyarakatan secara aktif memfasilitasi diskriminasi oleh warga negara terhadap masyarakat Papua.

Tabel 2 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet per Tiga Bulan

	Perkotaan + Perdesaan		
	2019	2020	2021
Pulau			
Sumatera	72,177	76,701	82,544
Jawa	80,898	83,698	86,095
Kalimantan	75,158	79,82	84,06
Sulawesi	68,553	73,885	79,746
NTT, NTB, dan Bali	64,89	70,683	76,62
Maluku dan Maluku Utara	56,065	64,125	73,16
Papua	48,965	53,935	54,67

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (bps.go.id²⁹) tahun 2019-2021. Diolah Kembali.

27 Jason R. Silva, "Mass Shooting Films: Myths, Academic Knowledge, and Popular Criminology," *Victims and Offenders* 14, no. 2 (2019): 239–264, <https://doi.org/10.1080/15564886.2019.1580232>.

28 Seong Min Park et al., "Social Constructions of Racial Images in Introductory Criminal Justice and Criminology Textbooks: A Content Analysis," *Race Ethnicity and Education* 24, no. 6 (2021): 842–855, <https://doi.org/10.1080/13613324.2018.1538122>.

29 "Presentase Rumah Tangga Yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah 2019-2021," *Badan Pusat Statistik*, accessed November 16, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/2/398/1/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>.

Tabel 3 Persebaran Pengaduan Kejahatan HAM

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pulau	185	281	273	293	289
Sumatera	156	330	374	474	392
Jawa	37	62	56	73	53
Kalimantan	45	59	70	83	87
Sulawesi	21	47	67	78	79
NTT, NTB, dan Bali	12	4	2	19	10
Maluku dan Maluku Utara	12	24	20	30	29

Sumber: Data Direktorat Jendral HAM (ham.go.id³⁰) tahun 2017-2021. Diolah Kembali.

B. Konstruksi Pemerintah dan Media yang Mempengaruhi Masyarakat

Eksistensi pemberitaan media tidak muncul tanpa ada pemicu yang mendorong. Dalam hal ini, pemerintah dan negara harus bertanggung jawab sebagai pelayan yang menaungi bangsanya. Melihat daerah Papua yang sejak dahulu masih ‘menjadi anak tiri’,³¹ strategi dan metode baru tentu diusahakan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai dari Papua. Keberadaan infrastruktur dan situasi suatu daerah yang dipromosikan akan meningkatkan diskusi dengan daerah tersebut sebagai topik.³² Tabel 1 juga telah menunjukkan ketimpangan wacana positif terhadap wacana negatif yang telah diberitakan kepada masyarakat. Dari hal ini, penggunaan media massa digital

sebagai media baru cenderung efektif karena bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.

Masyarakat mengakses media baru yang dalam hal ini berupa internet dan melalui teknologi media lainnya. Cakupannya yang luas menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menciptakan citra Papua yang diharapkan. Eksistensi wacana memberi pengaruh untuk membentuk opini dan diskusi publik.³³ Eksistensi opini menjadi hal yang rumit karena bisa memicu ekspektasi yang berlebihan perihal gambaran yang ingin pemerintah ciptakan. Media juga tidak bisa dikendalikan sepenuhnya terkait pemberitaan mereka karena sudah diatur terkait hak-hak Pers. Faktor-faktor tidak kaku inilah yang mendorong adanya ketidakpastian dalam rancangan yang ada.

Pada persebaran data pengakses Internet di pulau Papua (tabel 2) juga cenderung rendah sehingga keterlibatan masyarakat Papua dalam penciptaan wacana terkait kehidupan mereka sendiri tidak bisa terjadi. Dari hal ini, berbagai gambaran perihal masyarakat dan daerah Papua di Internet pada akhirnya tidak tercipta dan tersuarakan oleh masyarakat yang mengalami secara empiris dan hanya berdasarkan bagaimana masyarakat di luar Papua mempersepsikan wacana atau konten yang mereka terima.

Keberadaan pemerintah dan usaha pengembangan Papua melalui wacana positif menjadi tidak terkendali dengan adanya eksistensi masalah empiris yang melibatkan masyarakat

30 “Data Pengaduan HAM 2017,” *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*, accessed September 18, 2022, <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2017/>; “Data Pengaduan HAM 2018,” *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*, accessed September 18, 2022, <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2018/>; “Data Pengaduan HAM 2019,” *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*, accessed September 18, 2022, <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2019/>; “Data Pengaduan HAM 2020,” *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*, accessed September 18, 2022, <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2020/>; “Data Pengaduan HAM 2021,” *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*, accessed September 18, 2022, <https://ham.go.id/data-pengaduan-ham-2021/>.

31 Makna ‘anak tiri’ pada daerah dan masyarakat Papua menunjukkan bahwa dibandingkan dengan daerah lainnya, pemerintah masih kurang menunjukkan perlakuan yang setara terhadap daerah tersebut.

32 Bjørn P. Kaltenborn, Eivind F. Kaltenborn, and John D.C. Linnell, “‘It’s All about the Scenery’: Tourists’ Perceptions of Cultural Ecosystem Services in the Lofoten Islands, Norway,” *Arctic* 72, no. 1 (2019): 1–12.

33 Saeb Kasm, “Redefining Publics: Mosireen, State Crime and the Rise of a Digital Public Sphere,” *State Crime Journal* 7, no. 1 (2018): 100–140.

Papua. Kontradiksi tercipta antara wacana positif dan wacana negatif yang terus bermunculan di dunia internet. Berbagai kepentingan mulai muncul dari pemerintah, kelompok masyarakat Papua, serta media dan menciptakan kekacauan. Posisi Undang-Undang terutama tentang HAM yang seharusnya menjadi pelindung dan landasan menjadi tidak efektif dalam melindungi masyarakat Papua menimbang banyaknya intervensi yang terjadi.³⁴ Pemerintah secara tidak langsung menciptakan potensi terjadinya kekacauan.

Pemerintah memang pada akhirnya kurang mencermati bagaimana kekuatan dari media dan internet. Apa yang terjadi di daerah Papua dan masyarakatnya menjadi permasalahan utama yang kurang diperhatikan. Penciptaan wacana yang kontradiksi terhadap realitas masyarakat yang ada akan menciptakan perlawanan terutama oleh masyarakat yang merasa bahwa pemberitaan dan wacana tersebut kurang tepat.

Pada permasalahan HAM dan penanganan pengaduannya juga masih banyak berfokus pada daerah Jawa dan Sumatera (Tabel 3). Ada dua daerah/pulau yang kurang menjadi fokus, yaitu Papua dan Maluku (dan Maluku Utara). Pemberian perhatian oleh negara terhadap dua daerah ini masih cenderung kecil dalam penyelesaian masalahnya. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa dua daerah tersebut cenderung sedikit laporan kasus yang terjadi menimbang bahwa jumlah penduduk dan tingkat pendidikan yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lainnya. Hal ini juga yang mendorong tidak terdeteksinya atau justru memperburuk ketidakadilan yang menimpa mereka.

Dalam hal penyelesaian atau proses yang terjadi dalam penanganan kasus HAM di daerah Papua, tidak ditemukan data penyelesaian berbagai jenis pelanggaran HAM. Namun pada Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 ditemukan tiga kasus

penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan satu kasus tersebut terjadi di Papua yaitu peristiwa Abepura tahun 2000, tetapi dalam pemenuhan hak atas keadilan masih dinilai kurang.³⁵ Penyelesaian masalah HAM yang terjadi di Papua cenderung pada kasus yang sudah tersebar sampai ranah nasional (peristiwa Abepura dan Blokir Internet Papua 2019).

Negara mengambil tindakan berisiko dengan memperkenalkan keberagaman positif negara Papua dengan tidak mempertimbangkan keadaan mereka yang sebenarnya. Dengan keberadaan daerah Papua yang masih belum dapat setara dengan daerah lain, justru dimanfaatkan oleh negara melalui media dengan penciptaan wacana. Negara justru menciptakan kesenjangan yang lebih jauh akibat berbagai tindakan yang sering dilakukan.

Pemerintah menciptakan perpecahan yang melibatkan realita di Papua, wacana positif dengan potensi alamnya, tapi tercipta kontradiksi karena berbagai kejahatan yang dilakukan untuk menutupi mereka dari kenyataan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah hanya melihat daerah Papua saja sebagai objek yang harus dipelihara dan bukan kepada masyarakatnya.

C. Masyarakat dan Persepsi yang Terbentuk

Pandangan warga negara yang terbentuk dari konsumsi media pemberitaan mengenai Papua mengabaikan konflik dan permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Papua. Media dengan latar belakang kepentingan tertentu mempengaruhi bagaimana masyarakat menggambarkan Papua berdasarkan konten yang ditampilkan.³⁶ Pengabaian tersebut tidak hanya berada dalam tingkatan pengetahuan tetapi mempengaruhi interaksi warga negara dengan anggota ataupun kelompok masyarakat Papua

34 Andrian Gregorius Pandapotan Simamora and Georgius Ivan Budihardja, "Prinsip Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Penembakan Militer Terhadap Masyarakat Nduga Papua," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 499.

35 Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2019* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020).

36 Akmal Firdous et al., "Papua In Online Media: Framing Analysis On The News Of The Papua Conflict Republika.Co.Id and Tirta.Id" (Muhammadiyah Surakarta Universities, 2022), <http://eprints.ums.ac.id/101402/>.

secara keseluruhan dalam cara yang secara langsung menghasilkan diskriminasi dan kerugian terhadap masyarakat Papua.

Pada tingkat pribadi, permasalahan ini berpotensi untuk menghasilkan diskriminasi melalui stigma dalam interaksi antara masyarakat umum dengan masyarakat Papua yang memiliki perspektif kenyataan sosial yang berbeda mengenai kehidupan di Papua sebagai konsekuensi dari media. Interaksi pribadi bahkan memiliki dampak yang luas karena bagaimana masyarakat umum di media sosial secara tidak langsung menyebarkan wacana melalui diskusi yang dilakukan,³⁷ sehingga diskriminasi pada tingkat pribadi berbasis perbedaan realita sosial akan memfasilitasi diskriminasi antara kelompok dalam membenarkan dan menjustifikasi stigma antara masyarakat umum dengan masyarakat Papua.

Masyarakat mengutarakan opini mereka melalui media yang ditawarkan di ranah internet atau cetak. Dalam hal ini diskriminasi dan stigma akan mempengaruhi cara mereka berpikir dan memberikan komentar. Teknologi pada akhirnya menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk menciptakan dan menyebarkan sebuah fenomena,³⁸ yang dalam hal ini adalah eksistensi Papua dan permasalahan yang ada di dalamnya.

Dengan adanya opini yang saling berputar dan berkontradiksi satu sama lain, masyarakat memang lebih waspada dan sadar akan realita yang terbentuk di daerah Papua. Namun keterbatasan masyarakat yang hanya bisa sebagai pemberi komentar saja tidak dapat memberi pengaruh apapun, kontradiksi yang terjadi hanya akan berputar menjadi sebuah wacana yang dikonsumsi masyarakat umum, tapi tidak mengubah kondisi apapun dari masyarakat Papua.

Permasalahan representasi juga memiliki dampak yang sangat signifikan pada tingkat institusional yang mempengaruhi kuasa masyarakat Papua secara relatif dengan negara. Pengaruh media dalam mempengaruhi realita sosial masyarakat umum memberikan media kemampuan untuk mendorong kemampuan politik berbasis konstruksi realita sosial yang paling menguntungkan negara. Dalam Indonesia sebagai negara demokratis,³⁹ pemberitaan yang meminimalisir urgensi dari permasalahan yang dialami masyarakat Papua memfasilitasi negara untuk melakukan marginalisasi masyarakat Papua melalui menempatkan kebutuhan deterministik masyarakat Papua dalam prioritas yang rendah untuk memprioritaskan kepentingan negara.

Salah satu basis dorongan utama untuk menghasilkan perubahan demokratis adalah pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang dialami suatu kelompok masyarakat, dan media baru serta interaksi yang dihasilkan berbasis kenyataan yang dibentuk media berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan masyarakat Papua sehingga kepentingan dan kebutuhan mereka semakin tidak dapat direpresentasikan oleh masyarakat umum.

KESIMPULAN

Terdapat kesenjangan antara aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam pemberitaan berita *mainstream* mengenai masyarakat Papua dengan kenyataan realitas yang dialami masyarakat Papua secara konklusif, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Papua yang digambarkan oleh media dengan kenyataan pengalaman masyarakat Papua. Terlebih lagi kesenjangan pemberitaan media terhadap kenyataan pengalaman masyarakat Papua berpotensi untuk memfasilitasi atau mempengaruhi permasalahan yang sudah dialami masyarakat Papua. Bentuk kesenjangan pemberitaan tersebut mengabaikan kenyataan

37 Christopher Till, "Propaganda through 'Reflexive Control' and the Mediated Construction of Reality," *New Media and Society* 23, no. 6 (2021): 1362–1378.

38 Mark A. Wood, "Mapping Technology-Harm Relations: From Ambient Harms to Zemiiosis," *Crime, Media, Culture*, no. 1998 (2021): 1–18.

39 Emily Van Duyn, "Mainstream Marginalization: Secret Political Organizing Through Social Media," *Social Media and Society* 6, no. 4 (2020): 1–13.

dan konflik yang dialami oleh masyarakat Papua dan lebih mengedepankan terkait dengan pembangunan Papua dalam pemberitaannya. Oleh karena itu, pandangan warga tentunya akan berbeda jika melihat Papua itu sendiri. Bersamaan dengan hal tersebut juga permasalahan kesenjangan representasi ini dapat memfasilitasi negara untuk melakukan marginalisasi masyarakat Papua dengan memberikan prioritas rendah pada kebutuhan deterministik masyarakat Papua untuk memprioritaskan kepentingan nasional.

Pemberitaan di media yang membentuk representasi masyarakat Indonesia terkait dengan tanah Papua dapat menimbulkan banyak persepsi negatif dan cenderung mengarah pada pelanggaran HAM. Terlebih lagi kesenjangan pemberitaan media terhadap kenyataan pengalaman masyarakat Papua berpotensi untuk memfasilitasi atau mempengaruhi permasalahan yang sudah dialami masyarakat Papua menjadi lebih mengesankan dari pada sebelumnya. Kesenjangan yang ada tersebut juga menjadi sarana tersendiri untuk pemerintah dalam melanggengkan aksinya untuk melakukan banyak pelanggaran HAM terhadap warga dan masyarakat Papua dengan berbagai bentuk ketidakadilan dan juga kesenjangan sosial.

SARAN

Fokus utama yang dapat ditawarkan artikel ini terdapat pada faktor kajian manusia.. Masyarakat merupakan salah satu aktor terbesar terhadap permasalahan HAM yang terjadi di tanah Papua. Mereka harus dapat mengakses informasi yang tidak hanya bersifat subjektif berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh media. Masyarakat memerlukan kemampuan dalam memilah apa yang diterima dari media itu sendiri. Diperlukan literasi media oleh masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah fakta. Di sisi lain, cara media menggunakan pengutaraan dan *framing* terhadap mempresentasikan suatu budaya secara tidak representatif harus lebih dapat dijaga untuk tidak menghasilkan esensi negatif. Media seharusnya bisa lebih etis dan netral dalam pemberitaan sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi sebenar-benarnya.

Pemerintah harus lebih berhati-hati dan dipertanggungjawabkan dalam melakukan pengelolaan wacana. Permasalahan utama yaitu kekerasan harus lebih diusut untuk dapat menciptakan wacana positif sesungguhnya dari masyarakat dan daerah Papua. Pengadaan acara formal yang berbasis atau melibatkan unsur Papua sebagai perwakilan menjadi salah satu cara yang tepat dalam mendorong kesadaran serta melakukan promosi Papua yang tidak dilakukan dalam cara yang menghapuskan realitas pengalaman masyarakat Papua. Cara ekstrem seperti mengungkap permasalahan HAM yang ada juga menjadi cara ampuh mengurangi eksistensi pelanggaran HAM. Pemberitaan media pada akhirnya memiliki potensi glorifikasi positif terhadap wacana Papua jika hal tersebut bisa terlaksana.

Penelitian lebih lanjut harus dilakukan dalam menelaah banyaknya permasalahan HAM yang kurang diangkat dalam media baru. Dalam melihat pelanggaran HAM, berbagai faktor bisa diteliti sebagai pemicu kemunculan pelanggaran HAM. Faktor-faktor eksternal lainnya juga dapat ditinjau dan diteliti lebih lanjut untuk memperjelas timbulnya pelanggaran HAM meski sudah tersedia penegak hukum dan aturan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya maka penulisan ini dapat terselesaikan. Tulisan ini tidak terlepas dari partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak didalamnya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Bhakti Eko Nugroho, S.Sos., M.A. dan Agustin Dea Prameswari, M.Si. sebagai dosen pengampu Mata Kuliah Media Baru dan Kejahatan yang secara khusus telah memberikan bantuan dan pemberian pemahaman studi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Rick. "Fake News and Alternative Facts: Five Challenges for Academic Libraries." *Insights: the UKSG Journal* 30, no. 2 (2017): 4–9.
- APJII. *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020*. Jakarta, 2020. <https://apjii.or.id/survei>.
- . *Profil Internet Indonesia 2022*. Jakarta, 2022. apji.or.id.
- Creswell, W John, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. SAGE Publications Inc., 2018.
- Dekavalla, Marina. "Understanding Online Safety Through Metaphors: UK Policymakers and Industry Discourses About the Internet." *Television and New Media* (2021): 1–19.
- Dineen, Jennifer, Mark D. Robbins, and Bill Simonsen. "Social Class: Perception and Reality." *International Journal of Public Administration* 42, no. 1 (January 2, 2019): 55–65.
- Van Duyn, Emily. "Mainstream Marginalization: Secret Political Organizing Through Social Media." *Social Media and Society* 6, no. 4 (2020): 1–13.
- Firdous, Akmal, Study Program, Communication Science, Faculty O F Communication, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Papua In Online Media: Framing Analysis On The News Of The Papua Conflict Republika.Co.Id and Tirto.Id." Muhammadiyah Surakarta Universities, 2022. <http://eprints.ums.ac.id/101402/>.
- Gasser, Emily. "The Right to Say Yes: Language Documentation in West Papua." *Australian Journal of Linguistics* 37, no. 4 (October 2, 2017): 502–526.
- Gilbert, Paul Carson. "NGOs and Human Rights Promotion: Socialisation, Framing, and the Case of West Papua." University of Canterbury, 2008.
- Jackson, Liz, and Yulia Nesterova. "Multicultural Hong Kong: Alternative New Media Representations of Ethnic Minorities." *Multicultural Education Review* 9, no. 2 (2017): 93–104. <http://dx.doi.org/10.1080/2005615X.2017.1313021>.
- Kaltenborn, Bjørn P., Eivind F. Kaltenborn, and John D.C. Linnell. "'It's All about the Scenery': Tourists' Perceptions of Cultural Ecosystem Services in the Lofoten Islands, Norway." *Arctic* 72, no. 1 (2019): 1–12.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2019*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020.
- Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (2017): 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>.
- Lull, James. "Living with Television and the Internet." *New Media and Society* 23, no. 7 (2021): 1850–1862.
- Sakinofsky, Phyllis, Avril Janks, Treena Clark, and Karina Hawtrey. "Power Imbalance in Media Representation: An Aboriginal Australian Public Relations Experience." *PRism* 15, no. 1 (2019): 18–33.
- Schreier, Margrit, Christoph Stamann, Markus Janssen, Thomas Dahl, and Amanda Whittal. "Qualitative Content Analysis: Conceptualizations and Challenges in Research Practice-Introduction to the FQS Special Issue 'Qualitative Content Analysis I.'" *Forum Qualitative Sozialforschung* 20, no. 3 (2019): 1–27.
- Swart, Joëlle, Chris Peters, and Marcel Broersma. "Navigating Cross-Media News Use: Media Repertoires and the Value of News in Everyday Life." *Journalism Studies* 18, no. 11 (2017): 1343–1362.
- Till, Christopher. "Propaganda through 'Reflexive Control' and the Mediated Construction of Reality." *New Media and Society* 23, no. 6 (2021): 1362–1378.
- Viartasiwi, Nino. "The Politics of History in West Papua - Indonesia Conflict." *Asian Journal of Political Science* 26, no. 1 (2018): 141–159. <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535>.
- Wangge, Hipolitus Ringgi, and Stephanie Lawson. "The West Papua Issue in Pacific Regional

Politics: Explaining Indonesia's Foreign Policy Failure." *Pacific Review* 0, no. 0 (2021): 1–29. <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1931417>.

Wincup, Emma. *Criminological Research: Understanding Qualitative Methods*. London: SAGE Publications, Limited, 2017.

Wood, Mark A. "Mapping Technology-Harm Relations: From Ambient Harms to Zemiogenesis." *Crime, Media, Culture*, no. 1998 (2021): 1–18.

"Akses Internet Jangkau Pelosok Papua." *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*. Accessed September 21, 2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13517/akses-internet-jangkau-pelosokpapua/0/sorotan_media.

"Data Pengaduan HAM 2017." *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*. Accessed September 18, 2022. <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2017/>.

"Data Pengaduan HAM 2018." *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*. Accessed September 18, 2022. <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2018/>.

"Data Pengaduan HAM 2019." *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*. Accessed September 18, 2022. <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2019/>.

"Data Pengaduan HAM 2020." *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*. Accessed September 18, 2022. <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2020/>.

"Data Pengaduan HAM 2021." *Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*. Accessed September 18, 2022. <https://ham.go.id/data-pengaduan-ham-2021/>.

"Presentase Rumah Tangga Yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah 2019-2021." *Badan Pusat Statistik*. Accessed November 16, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/2/398/1/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>.